

## **DUNIA ISLAM DI ERA MODERN PADA MASA TUNISIA**

*Oleh: Rahmawati*

(Dosen pada Fak. Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar)

### **Abstract**

The islamization in Tunisia applied Maliki School, a sect that has existed in 8 century. Anyhow, most of ulama also adhered Asy'ariyah theology and eternalize religious tradition such Maulid ceremony, reciting sufistic rite. However, the Islamic progress in this country decreased following the political waves happening in Tunisia, notably in Franch colony. Along the Franch protectoral, there had been two religious movement namely, traditional and modern.

Kata Kunci: Islam, Perkembangan, Tradisional, modern

### **A. Pendahuluan**

Sejak Islam di kenal di Tunisia banyak masyarakatnya memeluk agama Islam, terutama masyarakat yang berada dikawasan Maghribi merupakan kaum sunni yang bermazhab Maliki yang berasal dari ulama abad kedelapan, yaitu Malik Ibn Abbas, namun di Tunisia banyak berdiri berbagai dinasti yang memerintah, baik asing maupun asli Tunisai yang memiliki keyakinan yang berbeda-beda, seperti Dinasti Syiah dan Dinasti Fathimiyah yang berhasil menumbangkan atau menjatuhkan pemerintahan Aghlabiyah antara tahun 905 dan 909, serta memerintah Tunisia pada abad kesepuluh sampai dinasti tersebut berpindah ke kairo pada tahun 1073.

Keislaman di Tunisia terbentuk dari tiga elemen, yaitu taklid dalam bidang fikih pada mazhab Maliki, teologinya Asya'ariyah, dan pendidikan sufisme. Elemen-elemen tersebut disusun oleh Ibnu Aasyir, Seorang *faqih* yang bermazhab Maliki, dari bahan-bahan teologi Asy'ari, fikih Iman Malik dan tarekat Junaid al-Baqhdadi.

Pola keislaman di Tunisia tetap mempertahankan mazhab maliki dan teologi Asy'ari pada batas-batas, serta melestarikan tradisi-tradisi keagamaan seperti peringatan Maulid Nabi saw. dan Pembacaan syair-syair sufistik yang telah mendarah daging dalam masyarakat. Akan tetapi pola keislaman di negeri ini dikritik oleh kelompok salaf yang berusaha menyingkapkan tradisi-tradisi tersebut dan bid'ah serta menawarkan konsep-konsep Islam yang murni, komprehensif, dan dasar-dasar pemerintahan Islam.

Melihat fenomena di atas adanya upaya untuk menemukan kembali semangat Sosial Pendidikan Islam tampaknya diperlukan, hal ini merupakan salah satu upaya untuk mengangkat kembali dunia kependidikan Islam sehingga kembali mampu survive di tengah masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan di atas, berikut di tegaskan masalah pokok yang dibahas dalam makalah ini adalah bagaimana kondisi sosial pendidikan Islam di Tunisia?. Agar pembahasan makalah ini lebih terarah dari permasalahan pokok tersebut dikemukakan sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kondisi Sosial Politik, Ekonomi dan Keagamaan di Tunisia?
2. Bagaimana Kondisi Sosial Pendidikan di Tunisia?

## **B. Kondisi Sosial Politik, Ekonomi, dan Keagamaan di Tunisia.**

Pembahasan tentang kondisi sosial politik di Tunisia dalam usaha memahami perkembangan dan kondisi pendidikan secara obyektif dan komprehensif memang sangat signifikan. Karena perkembangan sosial politik bukanlah sesuatu yang bersifat konstan, melainkan dinamis. Berkenaan dengan ini, setidaknya ada beberapa hal yang dapat dijadikan bahan analisis yaitu kondisi politik, ekonomi, dan keagamaan.

### *1. Kondisi Politik dan Ekonomi Di Tunisia*

Pada pertengahan abad ke 19 di Tunisia menaggung sejumlah problem yang sama sebagaimana dialami oleh imperium Usmani dan Mesir, yaitu menghadapi kekuatan ekonomi Eropa yang sedang berkembang pesat dan kemunduran perekonomian internal, para Dinasti Bey di Tunisia yang berusaha memodernisasi rezim mereka.

Ahmad Bey (1837-1855) mendirikan sekolah politik pada tahun 1838 dan mengundang sejumlah ahli Eropa untuk melatih pasukan infantry baru. Pada tahun 1857 Muhammad Bey (1855-1859) memberlakukan konstitusi yang memberikan perlindungan kepada penduduk Tunisia, akan persamaan pajak, kebebasan agama, dan pengadilan campuran antara Tunisia dan Eropa,<sup>1</sup> yang pada akhirnya pemerintahan diambil ahli oleh Khair al-Din pada tahun 1873-1877. Khair al-Din berusaha memperkuat Negara dengan memperkecil anggaran belanja public dan mereformasikan administrasi urusan agama.

Khair al-Din mendukung pendirian perguruan Sadiqi pada tahun 1875 yang mana perguruan ini bertujuan untuk melatih pegawai-pegawai pemerintahan dan mengangkat sejumlah supervisor baru untuk perguruan Masjid Zaytuna. Masjid Zaytuna didirikan pada masa dinasti Bey yaitu pada masa pemerintahan Ahmad Bey pada tahun 1842, Masjid Zaytuna menjadi pusat semua pengajaran agama. Yang berlangsung hingga abad kedua puluh yang mana diantara guruh-guruhnya menganut mazhab maliki dan mazhab hanafi.<sup>2</sup>

Di bawah kepemimpinan Khair al-Din, pemerintahan membentuk kantor-kantor baru untuk pengelolaan harta wakaf dan mereorganisir pengadilan muslim dan membuat program reformasi, untuk menghadapi tuntutan persamaan bangsa Eropa untuk membentuk pemerintahan yang memiliki landasan pada sosial dan ekonomi.<sup>3</sup>

Reformasi Khair al-Din menyerukan keadilan politik sebagai landasan bagi setiap perkembangan, dan membuat alasan tertentu untuk mendukung persamaan antara warga Eropa dan warga muslim. Dengan dalil bahwa kekuasaan dinasti Bey yang dibawah pemerintahan Ahmad Bey, harus dibatasi oleh ulama yang seharusnya berfungsi sebagai perlemen., ia berpendapat bahwasanya pemerintahan harus mengembangkan sains, industri, pertanian dan perdagangan.

Usaha Khair al-Din agar para ulama mau mendukung upaya reformasinya dan menerima teknik-teknik pemerintahan Eropa. Argumentasi reformasi Khair al-Din disandarkan pada tren politik Islam Klasik tentang pertanggung jawaban pemerintahan terhadap rakyatnya, walaupun kapasitas ulama sangat kecil untuk melancarkan perubahan atau menjalankan kekuasaan politik namun peranan mereka dalam masyarakat Tunisia sangat besar, karenapara ulama tersebut sarjana lulusan perguruan mesjid besar dan pekerjaan mereka sebagai guru dan hakim. Pada umumnya pihak ulama tidak menentang aspek-aspek teknik program Reformasi yang dicanangkan oleh Khair al-Din seperti pada bidang telegraph tetapi sebaliknya mereka menjadi terasing dari reformasi tersebut.<sup>4</sup>

Hingga pada tahun 1877 Khair al-Din diberhentikan dari jabatannya, akan tetapi gerakan reformasi di Tunisia selanjutnya mengikuti pola-pola reformasi yang berlaku di Mesir dan pada Imperium Usmani. Namun mereka membatasi diri dalam mengkonsolidasi kekuasaan Negara. Sedangkan pada sisi lain, Tunisia tidak mampu bertahan dari tekanan politik dan ekonomi internasional. Sebagai respons terhadap tekanan politik dan kebutuhan ekonomi, rezim Tunisia merdeka telah mencoba menerapkan sejumlah strategi ekonomi yang berbeda, di antaranya, sejak tahun 1956 sampai 1961, secara umum rezim Tunisia memberlakukan kebijakan ekonomi liberal. Pada tahun 1956 dan 1957 pemerintahan mengambil pertahanan warga perancis dan menempatkan kekayaan wakaf di bawah pengawasan pemerintah, dan membuka jalan bagi pemilikan pribadi terhadap pertahan kolektif.<sup>5</sup>

Investasi publik yang sangat besar dan pinjaman modal dari sumber-sumber luar negeri menjadi basis bagi pembangunan ekonomi. Pada tahun 1969 kebijakan ini juga mengalami kegagalan dan Tunisia kembali kepada percampuran antara sektor swasta, koperasi, dan sektor publik dan menggalakan kembali investasi swasta asing. Selain beberapa upaya untuk membangun perekonomian, rezim Tunisia teguh menjalankan sekularisasi masyarakat Tunisia secara drastis.

## *2. Kondisi Sosial Keagamaan di Tunisia*

Pada awal di mulainya protectoral Prancis pada tahun 1883, baik mazhab Hanafi maupun Maliki sudah terkukuhkan dengan baik di Tunisia. Sepanjang periode protectoral ini, Prancis menyerahkan soal-saol status pribadi, misalnya, perkawinan, perceraian, waris-mewarisi dan kepemilikan tanah, sedangkan yurisdiksi pengadilan syariat dikepalai oleh hakim-hakim Maliki dan Hanafi. Namun prinsip-prinsip peraturan hukum Perancis berlahan-lahan di terapkan pada hukum Islam. Akan tetapi Administrasi Prancis, melakukan diskriminasi terhadap muslim Tunisia yang membuat orang sangat sulit untuk tetap menjadi seorang muslim tradisional.<sup>6</sup>

Keislaman tradisional di Tunisia terbentuk dari tiga elemen, yaitu taklid dalam bidang fikih pada mazhab Maliki, teologi Asy'ariya dan pendidikan sufisme.<sup>7</sup>

Pola ke Islaman di Tunisia tetap mempertahankan mazhab Maliki dan Teologi Asy'ari pada batas-batas tertentu, serta melestarikan tradisi-tradisi keagamaan seperti peringatan maulid Nabi saw dan bacaan syair-syair Sufistik yang telah mendarah daging dalam masyarakat.

Tarekat yang berkembang di Tunisia ada empat yaitu Qadiriyyah, Tarekat Rahmaniyyah, Tarekat Isawa dan Tarekat Tijaniyyah. Dan Tarekat yang cukup banyak anggotanya adalah tarekat Arusiyyah. Namun peranan politik tarekat praktis nol dan pengaruh keagamaan mereka berlahan-lahan menurun. Gerakan kebangkitan Islam di Tunisia akhir-akhir ini tidak mengambil bentuk sebagai tarekat. Prancis yang hanya menerima Islam formal, sehingga memaksa banyak orang Krumir (Orang-orang Tunisia Barat Laut) untuk mengambil atau memeluk Islam mereka.<sup>8</sup>

Sepanjang periode protektorat Prancis, terdapat dualisme dimana-mana antara sektor-sektor tradisional Tunisia dan sector paduan atau hasil, pengaruh Prancis di Tunisia yang masuk ke seluruh aspek kehidupan, yang termasuk sistem pendidikan dan hukum serta layanan sipil.

Pada tanggal 20 maret 1956 Prancis mengakui secara resmi kemerdekaan Tunisia. Pada tahun yang sama Presiden Habib Bourguiba, melakukan gebrakan melalui sebuah langkah controversial yaitu membuat Undang-undang Status Pribadi yang menggantikan Hukum Al-Quran dalam bidang –bidang Perkawinan, Perceraian dan Pemeliharaan anak yang tidak hanya menentang beberapa praktik muslim Tradisional, sebagai seorang negarawan dan pahlawan dalam gerakan kemerdekaan Habib Bourguiba berhasil mendapatkan dukungan untuk membuat undang-undang pribadi yang controversial itu dari kalangan yang berpengaruh dalam tubuh ulama sehingga mengambil pendekatan pembaruan yang kurang radikal.<sup>9</sup>

## *3. Kondisi Sosial Pendidikan Di Tunisia*

**a. Pada Masa Khair al-Di>n.**

Ketika protektorat Prancis terbentuk secara resmi melalui perjanjian La Marsa, Mesjid Zaitunah sebagai salah satu pusat kajian keislaman klasik terkemuka yang di bawah pengaruh budaya Prancis, baik Zaitunah maupun Sadiqi college yang pimpinannya Khair al-Di>n yang didirikan pada tahun 1875 dengan tujuan memperkenalkan Pendidikan Modern pada Tunisia dan menjadikan pertumbuhan gerakan nasionalis yang lebih berakar di sekolah-sekolah dari pada di dalam gerakan massa.<sup>10</sup>

Sistem pendidikan Prancis dikembangkan oleh Alliance Francaise, antara tahun 1885 dan 1992 sekitar 3000 warga Tunisia mengirimkan putra-putra mereka ke Paris. Prancis juga terlibat dalam Pendidikan Muslim. Yang mana pada tahun 1898 mereka berusaha mereformasikan Perguruan Zaytuna dengan menambahkan sejumlah mata pelajaran moderen dan beberapa metode pedagogis, tetapi pihak ulama menentang campur tangan ini dengan memasukkan pelajaran hukum Islam.

Walaupun demikian, beberapa ulama Tunisia dan pejabat Prancis bekerja sama dalam mereformasikan pengajar public, administrasi wakaf dan manajemen Perguruan Sadiqi. Di kalangan Maliki yang kelahiran pedalaman lebih cenderung bekerja sama dengan Prancis dari pada melakukan upaya perbaikan di Perguruan Hanafi. Dari peristiwa itulah terjadi perpecahan di kalangan ulama yang menyebabkan sebuah aliansi antara pemerintah dan lembaga keagamaan Muslim.

Dengan demikian, Tunisia menerima pemerintahan Prancis tanpa adanya kesulitan yang berarti, tetapi sekalipun secara politik relatif tenang akan tetapi para pejabat, intelektual dan ulama Tunisia bangkit untuk menentang pemerintahan Prancis, sehingga muncullah generasi baru dari para pemuka nasional Tunisia dari kalangan birokratik yang terdidik secara moderen.<sup>11</sup>

Semenjak tahun 1880 sampai 1930 para pemuka Tunisia muncul dari latar belakang pemerintahan dan ulama, sebagian di antara mereka berlatar belakang pendidikan sekolah Prancis, sebagian lainnya merupakan kalangan yang berpihak kepada reformasi cultural Islam. Pada tahun 1888 para alumni Perguruan Zaytuna dan Perguruan Sadiqi membentuk Surat kabar mingguan *al-Hadira* untuk mengulas peristiwa Eropa dan peristiwa dunia, serta mendiskusikan isu-isu politik, ekonomi, dan sastra. Dari sekolah Muslim Modern dan dari sekolah-sekolah Prancis melahirkan "Pemuda Tunisia" yang memiliki jati diri, lantaran mendapatkan pengaruh Arab Timur, utamanya ajaran-ajaran Jamaluddin al-Afghani, Abduh dan partai nasional Mesir, mereka menyekong Modernisasi dan westernisasi masyarakat Tunisia dan mendukung kebangkitan kultur dan syair Arab, sejarah, geografi, dan teori-teori sosial.

Pemuda Tunisia juga mensponsori sebuah lembaga sekolah al-Qur'an Modern yang di dalamnya para pelajar di ajarkan al-Qur'an, bahasa Arab, dan dasar-dasar ilmu aritmatika, geografi, sejarah, serta bahasa Prancis. Generasi

ini sangat memberikan perhatian terhadap reformasi administrasi hukum Islam dan pendidikan kesastraan Arab.

#### **b. Pada Masa Habib Bourquiba**

Habib Borquibah dia adalah Presiden Tunisia dari 25 juli 1957 hingga 7 November 1987. Ia sering disamakan dengan pemimpin Turki Kemal Ataturk sebab reformasi Pro-Barat yang dilakukan selama pemerintahannya. Burquiba diangkat sebagai presiden pada tahun 1957 setelah tergulingnya Bey Muhammad al-Amin, Raja Tunisia.

Dengan menganut pemahaman moderen, ia memeperjuangkan sekularisme dan hak wanita. Akibat terpengaruh pemikiran Barat, Habib Bourquiba selalu menghina Islam. Secara implisit ia menentang pemahaman dan ketentuan Syariat yang sudah jelas dilarang dan dihina. Saat berpidato di depan mahasiswa Jurnalistik mengenai sejarah Islam. Ia mengatakan al-Qur'an mengandung sekian kekeliruan yang tak bisa lagi diterima akal rasional.

Habib Buorqaiba pada masa kepemimpinannya, menutup universitas az-Zaytunah yang merupakan universitas tertua di afrika, padahal universitas ini menjadi pusat pendidikan Islam di Afrika dan Eropa meski saat Prancis menjajah Tunisia. Salah satu tujuan maker Habib Bourqaiba adalah ingin membaratkan Tunisia, sehingga bahasa Arab diganti bahasa perancis sebagai bahasa pergaulan masyarakat maupun bangsawan. Mahkamah Syariat diganti dengan makamah sipil yang peraturan Undang-Undangnya mengadopsi sepenuhnya Undang-Undang Barat. Dalam usahanya melemahkan Institusi Islam, Bourqaiba merencanakan UU yang bertujuan merampas harta wakaf di seluruh Tunisia. Sekolah dan Madrasah yang mengajarkan al-Qur'an ditutup.

Program Liberalisasi dimulai pada tahun 1981 menyusul berhentinya PM Konservatif Hedi Nouira. Ribuan wanita Islam disingkirkan dari pegawai pemerintahan dan pusat pendidikan. Bayak yang dilarang berhijab dalam kehidupan umum seperti rumah sakit dan jalan raya. Meski dilarang UU dan dipersempit aparat keamanan, para pemakai jilbab di Tunisia tetap semakin bayak jumlahnya. Pemakai jilbab di sana dilarang menurut UU No. 108 tahun 1981. Isisnya menegaskan bahwa jilbab ialah busana etnis atau kelompok yang bukan kewajiban agama sehingga dalam UU itu ditulis larangan berhijabab di sekolah dan perguruan tinggi, akibatnya timbul hubungan yang tidak harmonis antara presiden Habib Bourqaiba dengan gerakan Islam, di karenakan Bourqaiba teracuni pemikiran barat. Dengan berkedok agama, ia memberangus Islam yang diyakininya tidak sesuai pemahaman Islamnya. Padahal ternyata ia memakai Islam sebagai kedok saja, ia mengadopsi pemahaman pemikiran Perancis yang menyatakan semua hal terdahulu pasti usang, sehingga ia menganggap Islam itu usang. Sebab warisan nenek moyang.

Kejatuhan dan kematian kepresidenannya berakhir saat usia lanjut serta keadaan unzur sehingga PM Zainal Abidin bin Ali melancarkan kudeta

melawan pemerintahannya. Bourqaiba kemudian dikenakan tahanan rumah hingga meninggal di Monastir.

### **c. Pada Masa Zain al-Abidin bin Ali.**

Zain al-Abidin bin ali lahir 3 September 1936 di Sousse ia Presiden Tunisia sejak 7 November 1987, Presiden yang kedua sejak kemerdekaannya dari Prancis pada 1956. Sebagai militan muda dari partai Neo Destour, ia dikirim ke Prancis untuk menjalankan latihan militer. Ia lulus dari sekolah Inter-Arms di Saint-Cry dan sekolah Artileri di Chalons-en-Champagne, dan kemudian melanjutkan pendidikan militernya di Amerika Serikat. Ia dipromosikan sebagai Direktur-Jenderal Keamanan Nasional dalam Departemen Dalam Negeri pada 1977 setelah menjabat sebagai atase militer di Maroko. Ben Ali kembali dari 4 tahun sebagai Duta Besar untuk Polandia menjadi kepala Keamanan Nasional Namun kini dengan posisi setingkat Menteri.

Ia mengambil posisi ini saat berkembangnya gerakan Islam radikal. Pada saat ini ia diangkat sebagai MENDAGRI, dan bertahan pada posisi ini saat ia menjadi Perdana Menteri di bawah Presiden Habib Bourqaiba pada 1 Oktober 1987. Bin Ali memecat Presiden Bourqaibah dan memangku jabatan Presiden pada 7 November 1987 dengan dukungan beberapa rakyat. Tujuh orang doktor menandatangani kertas yang menyatakan Presiden Bourqaiba tak cakap menjabat. Sesungguhnya Ben Ali telah menjadikan Tunisia sebagai penjara terbuka dan pusat kebejatan moral. Wahasil dengan salah kaprahnya pemikiran dan pemahaman rezim yang ada, Islam dan para pengembannya mengalami derah, siksaan, dan hambatan berat. Bin Ali melanjutkan pendekatan otoriter pendahulunya dan memuja kepribadian. Meskipun ia mengumumkan pluralisme politiknya pada 1992. Rapat Umum Konstitusional Demokratiknya melanjutkan dominasi politik nasional.

Ia kemudian mempertahankan sikap politik luar negeri non-blok dan mendukung ekonomi yang telah berkembang sejak awal 1990-an. Proyek pekerjaan umum yang besar termasuk bandara, jalan raya atau perumahan, telah dijalankan. Bagaimanapun, pengangguran menyisakan masalah ekonomi yang besar. Di masa rezimnya gerakan-gerakan yang ada di Tunisia mengalami nasib lebih tragis dari sebelumnya. Tatkala partai menyapu bersih perolehan kursi yang ada di perlemen, ia memenjarakan lebih dari 30.000 aktivis gerakan Islam yang merupakan tulang punggung partai yang olehnya dianggap sebagai pembangkang.

### **C. Penutup**

Setelah mengkaji data-data yang masih sangat terbatas mengenai sejarah sosial pendidikan Islam di Tunisia dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, Pola keislaman di Tunisia tetap mempertahankan mazhab maliki yang berasal dari ulama abad kedelapan yaitu malik Ibn Abbas, akan tetapi banyak di antara mereka memiliki teologi Asy'ari, serta melestarikan tradisi-tradisi keagamaan seperti peringatan maulid Nabi saw. dan pembacaan syair-syair sufistik, tetapi pengaruh keagamaan mereka menurun secara perlahan-lahan, karena peranan politik tarekat praktis nol, bahkan gerakan kebangkitan Islam di Tunisia tidak mengambil bentuk sebagai tarekat, karena pada masa pemerintahan Prancis hanya mengambil atau menerima Islam formal.

Kedua, Sepanjang periode protectoral Prancis, terdapat dualisme antara sektor-sektor tradisional Tunisia dan sector panduan Prancis di Tunisia yang masuk ke seluruh aspek kehidupan yang termasuk sistem pendidikan dan hukum serta layanan sipil.

---

*End notes:*

<sup>1</sup> Ira M. Lapidus, *History of Islam Societies* diterjemahkan oleh Ghufuran A.Mas'adi dengan judul *Sejarah Sosial Ummat Islam*, Bagian Ketiga, (Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 228.

<sup>2</sup> Johnk.Eposito, *Ensklopedi Oxford (Dunia Islam Moderen)*, (Cet .II; Bandung: Mizan, 2002), h. 56.

<sup>3</sup> Ira M. Lapidus, *op.cit.*, h. 228.

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 230.

<sup>5</sup> *Ibid.*, h. 235.

<sup>6</sup> Johnk. Esposito, *op.cit.*, h. 57.

<sup>7</sup> Ustadz' Abid al-Jabiri, *Studi Tentang Peranan Kelompok Ortodoks dalam Pembaruan di Negara-negara Timur Jauh*, Makalah disampaikan pada Seminar Kebangkitan Islam di Tunisia pada Oktober 1984.

<sup>8</sup> James. Allman, *Sosial Mobility and Development in Tunisia*. (Leiden, 1979). Kajian Ilmu Sosial Menyeluruh Tentang hubungan antara Mobilitas Sosial, tingkat pendidikan dan potensi pembangunan.

<sup>9</sup> Johnk Esposito, *op.cit.*, h. 57-58.

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 59.

---

<sup>11</sup> Ira M. Lapidus, *op.cit.*, h. 231.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Lapidus, M. Ira. A. *History of Islam Societies*. Diterjemahkan oleh Ghufran A. Mas'adi dengan judul *Sejarah Sosial Ummat Islam*, Bagian Ketiga. Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000,
- Esposito, Jonh. *Ensklopedi Oxford, Dunia Islam Modern*. Cet. II; Bandung, 2002.
- al-Jabiri, 'Abid. *Study Tentang Peranan Kelompok Ortodoks Dalam Pembaharuan di Negara Timur Jauh*, Makalah disampaikan pada Seminar Kebangkitan Islam di Tunisia pada Oktober 1584.
- Allman, James. *Sosial Mobility and Development in Tunisia*. Leiden, 1979. Kajian Ilmu Sosial Menyeluruh tentang Hubungan antara Mobilitas Sosial, Tingkat Pendidikan dan Potensi.